

PUSTAKA ACUAN

1. Buku

Atmaja. I Dewa Gede, 2012. *Ilmu Negara*. Malang. Setara Press

Adisasmita Rahardjo. 2013. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*.
Yogyakarta. Graha Ilmu.

Mulyadi dedi. 2014. *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila Dalam Dinamika
Demokrasi Dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung.
Refika Aditama.

Makarao Mohammad Taufik. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*.
Jakarta. Rineka Cipta.

Ridwan Juniarso & Sodik Achmad. 2008. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep
Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung. Nuansa.

Rangkuti Siti Sundari. 2015. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan
Lingkungan Nasional*. Edisi Ke empat. Surabaya. Airlangga University
Press.

Syaodih Ernady. 2015. *Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota*.
Bandung. Refika Aditama.

Maruli Sahat. 2017. *Penahanan Tersangka*. Bandung. Logos Publishing

Wahid Yunus A.M. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta. Kencana.

2. Jurnal

- Muh Nasrul. 2017. 'Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota'. Vol.22. No.1. *Jurnal Perspektif Hukum Universitas Hasanudin*.
- Chintya D Putri Dkk. 2015. 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Dengan Perspektif Good Environmental Governance'. Vol. 1 No.3. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Dhini Dewiyanti. 'Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung Suatu Tinjauan Awal Taman Kota Terhadap Konsep Kota Layak Anak'. Vol. 7 No.1. *Majalah Ilmiah Unikom*.
- Hamrun A Luhur Prianto. 2015. ' Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar'. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom.
- Muhar Junef. 2017. 'Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan'. Vol.17 No.4. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Fathkul Muin. 2014. 'Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah'. Vol. 8 No.1. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sri Kusriah. 2016. 'Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia'. Vol.3 No.1. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.

3. Skripsi

Anang Saputro, 'Implementasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Surakarta', (Skripsi yang tidak dipublikasikan, Program Pendidikan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012)

Sartika, 'Tinjauan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Terbuka Hijau Menjadi Aktivitas Kegiatan Ekonomi Di Kota Makassar' (Skripsi yang di publikasikan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 20017),

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035

5. Situs Internet

<https://www.mongabay.co.id/2019/02/14/kawasan-cekungan-bandung-terpuruk-akibat-rencana-pembangunan-buruk/> di akses pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019, Pukul 23:13 WIB.

http://tahuradjuanda.jabarprov.go.id/Tentang_Kami.htm di akses pada hari Jumat, Tanggal 22 Maret 2019, Pukul 23:18 WIB.

<http://dppk3.bandung.go.id/ruang-terbuka-hijau> di akses pada hari Sabtu, Tanggal 16 Maret 2019, Pukul 8:52 WIB.

<https://bandungkota.bps.go.id> di akses pada hari Jumat, Tanggal 19 April 2019, Pukul 01:00 WIB.